

Home &gt; Kolom &gt; Kolom

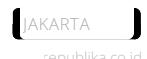
## Islam dan Kemerdekaan Beragama Institusional (II)

Kamis 30 Jan 2020 06:04 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Thursday, 30 Jan 2020

07:15:41



republika.co.id

**ZHUHUR**  
12:09

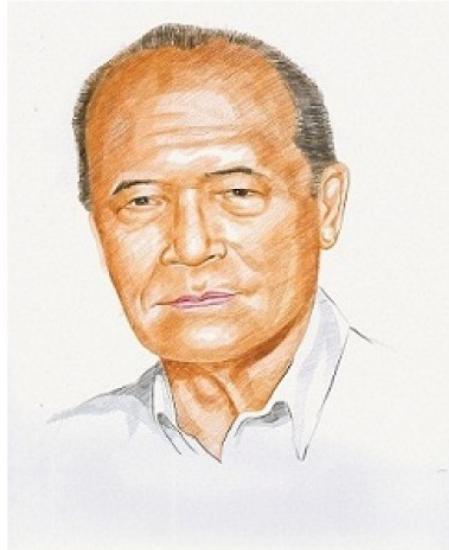

0



0



0



EMBED &lt;iframe src="https://www.republika.co.id/jac

Professor Ahmad Syafii Maarif

Foto: Republika/Daan

Lembaga utama yang mempertahankan persekutuan ulama-negara adalah jaringan madrasah.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: **Ahmad Syafii Maarif**

Banyak pengamat yang mengatakan Islam menurut sifatnya menolak pemisahan negara-agama. Jika pendapat ini benar, menjadi tidak mungkin ditegakkan sepenuhnya kemerdekaan beragama di dunia Muslim.

Saya tidak setuju dengan pendapat para pengamat di atas. Adalah fakta sejarah antara abad ke-7 sampai dengan pertengahan abad ke- 11, sebagian besar sarjana

## RESONANSI

Mafia Migas



## ANALISIS

Islam memiliki suatu tingkat pemisahan dari otoritas negara dan mereka didanai oleh usaha perniagaan. Sampai dengan pertengahan abad ke-11, sarjana-sarjana Islam terkemuka, termasuk pendiri mazbab yurisprudensi Sunni, menolak untuk menjadi abdi negara, bahkan mereka menghadapi penyiksaan.

Karena pandangan mereka yang berbeda, Abu Hanifa dibunuh dalam penjara, Malik dicambuk, Syafii dikurung dan dirantai, dan Ibn Hanbal dipukul dalam penjara. Kisah pendiri mazhab Sunni yang tertua, Abu Hanifa, adalah contoh yang tepat. Dia adalah seorang pedagang sutera yang menolak jadi abdi negara.

Abu Hanifa menampik tawaran pribadi khalifah Abbasiyah untuk jabatan hakim dengan alasan bahwa dia tidak layak untuk jabatan itu. Khalifah menjadi marah dan menyebutnya sebagai seorang pendusta.

Abu Hanifa menjawab bahwa seorang pendusta tidak dapat diangkat jadi seorang hakim. Khalifa memasukkannya ke dalam penjara kemudian diracun sampai mati.

Dengan bersikap kukuh melawan pengawasan negara atas agama, ulama Sunni dan Syi'ah telah membangun contoh peran (*role models*) bagi sarjana-sarjana yang datang, kemudian pada beberapa abad berikutnya dalam pengertian bekerja dengan suatu tingkat otonomi yang penting dari pengawasan otoritas politik.

Menurut sebuah analisis modern, dari jumlah 3.900 sarjana Islam yang hidup antara abad ke-8 dan pertengahan abad ke-11, hanyalah sejumlah kecil (8,5 persen) bekerja sebagai pejabat negara.

Namun, perubahan terjadi pada abad ke-11 karena berubahnya kondisi politik. Dua orang khalifah Abbasiyah yang berurutan di Baghdad semakin lemah secara politik akibat munculnya pasukan militer Syi'i di berbagai bagian dunia Muslim. Keduanya menghendaki penyatuan golongan Sunni. Khalifah ini mengumumkan suatu credo Sunni, di dalamnya ditegaskan penganut Syi'i tertentu, Muktazilah, dan para filsuf dinyatakan murtad dan risikonya hukuman mati.

Panggilan untuk pembentukan ortodoksi Sunni ini diterima dengan baik pada pertengahan abad ke-11 oleh sebuah kekuatan militer baru-- Imperium Saljuk. Pasukan Saljuk mengalahkan pasukan militer Syi'i. Maka itu, kemudian berlakulah militerisasi dan pemerintahan ekonomi dan pendirian sejumlah madrasah untuk menjadikan sarjana Muslim/ulama sebagai abdi negara.

Persekutuan ulama-negara telah menjadi tonggak utama bagi imperium Muslim berikutnya, termasuk imperium Mamluk dan Turki Utsmani. Persekutuan semacam ini telah meminggirkan peran saudagar, filsuf, dan para sarjana yang punya pendirian berbeda. Di sebagian besar dunia Muslim, persekutuan ulama-negara ini memaksakan ajaran ortodoks Islam melalui ketentuan negara. Akibatnya, ruang kemerdekaan beragama individu dan kelembagaan menjadi semakin sempit.

Dasar kelembagaan adalah madrasah. Lembaga utama yang mempertahankan persekutuan ulama-negara adalah jaringan madrasah. Perdana Menteri Saljuk yang

Omnibus "Naif" Law,  
Haramkan Sertifikat  
Halal?



Tantangan Fiskal  
Sektor Energi pada  
2020



## FOKUS

Membaca Persaingan  
Ketua Umum PAN



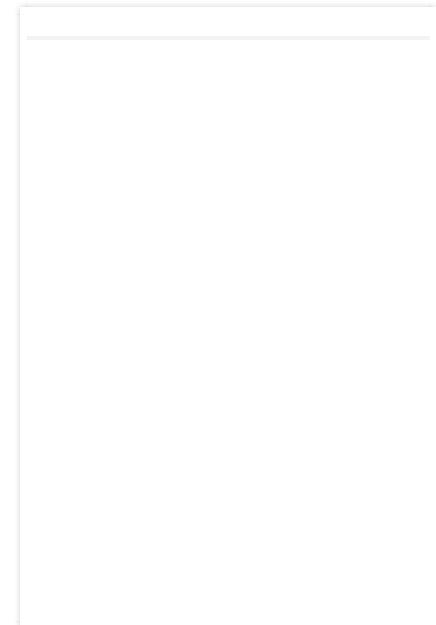
Menanti Gebrakan  
BPKH Soal Uang  
Elektronik Jamaah



Pengaturan Khutbah  
Jumat di Negara  
Antara



## INFOGRAFIS



agung Nizam al-Mulk (1064-1092) menjadi pelindung sebuah madrasah di Baghdad, yang kemudian menjadi pelopor dari jaringan itu.

SELARUNG

Lembaga-lembaga ini kemudian disebut madrasah Nizamiyah yang selanjutnya model serupa menyebar ke Irak, Iran, Asia Tengah, pada periode Mamluk, Turki Utsmani, ke Mesir, Suriah, Anatolia, dan Balkan. Melalui jaringan madrasah inilah persekutuan ulama-negara telah membersihkan kekuatan-kekuatan penentang sampai pada era modern.

Benarkah di Purworejo  
Pernah Berdiri  
Kerajaan?

#### Baca Juga

[Islam dan Kemerdekaan Beragama Institusional \(I\)](#)

[Islam, Wabah Corona, Hingga Fatwa Haram Haji Hasyim Asy'ar](#)

[Ketahanan Pesantren \(1\)](#)

#### TERPOPULER



Turis Muslim China di Sumbar Minta Maaf

Rabu , 29 Jan 2020, 17:04 WIB

Manfaat Azan Ternyata tak Hanya untuk Panggilan Shalat



Pemerintah Tajikistan Ubah Masjid Jadi Bioskop



Ini Negara Muslim Terkorup dan Paling Bersih dari Korupsi



Negara Lain Memulai Evakuasi, Jokowi: Wuhan Masih Dikunci



Nabi Muhammad Bertemu Pemuda yang Gendong Ibunya Saat Thawaf



**BACA JUGA:** Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di [Islam Digest](#), Klik di Sini

Komentar 0



Dapatkan Update Berita Republika

Masukan Email Anda

Subscribe

[islam](#) [muslim](#) [resonansi](#) [kemerdekaan beragama](#) [beragama konsisional](#) [ahmad syafii maarif](#)

#### BERITA TERKAIT

[Anjuran Mendekati Orang Saleh](#)

[Hubungan Menghafal Alquran dan Kecerdasan Kognitif](#)

#### REPUBLIKA TV



Tengat Waktu 10 Hari untuk Membangun RS Khusus Virus Corona

Rabu , 29 Jan 2020, 20:11 WIB